BAPPELITBANGDA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Setulus Hati Sepenuh Jiwa | MEMBANGUN SULSEL

TRANSFORMATIFKI'

Komitmen Pemerintah Daerah dalam Penyusunan RPJPD/RPJMD Berbasis Perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Dr. Setiawan Aswad, M.Dev.Plg
Kepala Bappelitbangda Sulsel

Makassar, 27 Februari 2025

Gambaran Umum RPJPD Sulawesi Selatan 2025-2045

SALINAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa perencanaan pembangunan mempunyai peran dan fungsi dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung perencanaan pembangunan nasional, perlu menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 sebagai perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, rencana pembangunan jangka panjang daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

“SULAWESI SELATAN MAJU, MANDIRI & BERKELANJUTAN”

Sasaran Utama & Indikator Visi RPJPD SULSEL 2025-2045

No.	Sasaran Visi	Indikator	Base Line 2025	2029	2034	2039	Target 2045
1	Peningkatan pendapatan per kapita	1. PDRB/kapita (Rp. Juta)	76,58–77,35	164,78	250,57	336,37	422,16–497,92
		2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia	71,31	122,3	173,3	224,29	275,29
		3. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	12,95–13,05	13,30–14,76	14,73–16,48	16,13–18,20	18,62–19,92
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	4. Tingkat kemiskinan (%)	7,30–7,89	5,60–6,1	3,90–4,3	2,20–2,5	0,19–0,69
		5. Rasio Gini (Indeks)	0,371–0,376	0,340–0,355	0,324–0,340	0,310–0,324	0,309–0,332
		6. Kontribusi PDRB Provinsi Sulawesi Selatan terhadap nasional (%)	3,21	3,21–3,22	3,22	3,23	3,23
		7. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50–6,30	6,2	6,7	6,8	6,90–8,94
3	Peningkatan daya saing daerah	8. Indeks Inovasi Daerah	54–55	60–63	65–67	70–73	75–80
		9. Indeks Daya Saing Daerah	3,45	3,49	3,52	3,56	4,00
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	10. Indeks Modal Manusia	0,52	0,56	0,61	0,65	0,69
5	Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	11. Penurunan Intensitas emisi GRK (%)	37,00	52,05	70,05	81,21	89,74
		12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,60	79,38	81,16	82,94	84,75

17 Arah Pembangunan, 8 Misi, 46 Indikator Utama Pembangunan

Sumber: Perda No.7 Tahun 2024 (RPJPD 2025-2045 Sulsel)

MISI RPJPD PENDUKUNG EKONOMI HIJAU

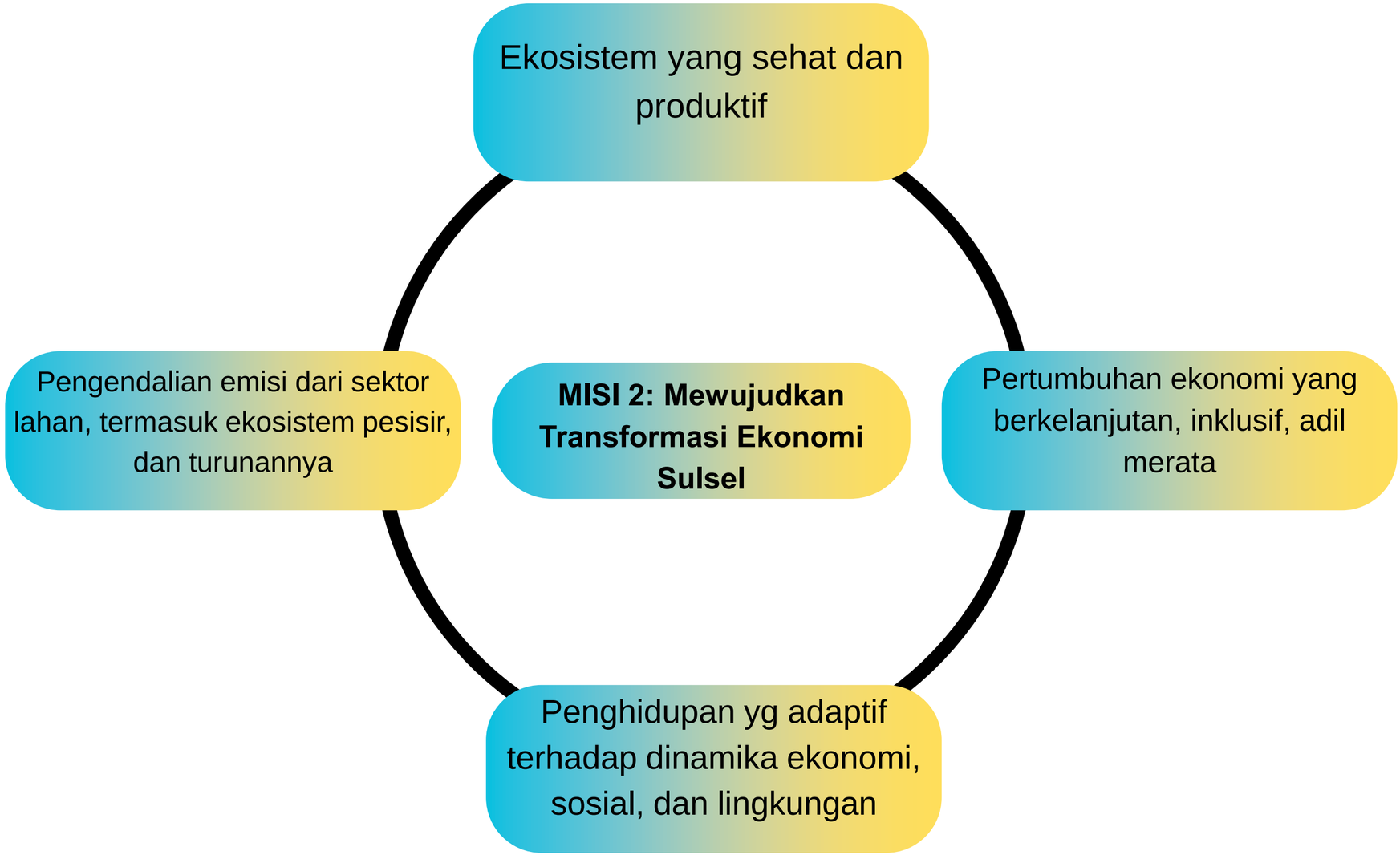

Sumber: Perda No.7 Tahun 2024 (RPJPD 2025-2045 Sulsel)

STRATEGI PERTUMBUHAN EKONOMI SULSEL DALAM MENDUKUNG EKONOM HIJAU

7 STRATEGI PERTUMBUHAN EKONOMI SULSEL

- Pengelolaan tata ruang dan tata guna lahan terintegrasi
- Pemanfaatan instrument ekonomi untuk mendukung pengelolaan jasa lingkungan
- Optimalisasi modal dan akses pembangunan yang berkeadilan, responsive, inklusif, dan inovatif
- Pengelolaan dan restorasi DAS
- Pengembangan produktifitas dan daya saing sektor unggulan
- Perbaikan rantai nilai yang mendukung pengembangan ekonomi masy melaluiUMKM dan koperasi
- Konektifitas wilayah yang adaptif terhadap bencana

Sumber: Perda No.7 Tahun 2024 (RPJPD 2025-2045 Sulsel)

KERANGKA PENYELARASAN STRATEGI PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU DAN ARAH PEMBANGUNAN TRANSFORMASI

*"Dari 17 Arah Pembangunan, terdapat **10 Arah Pembangunan** yang memuat Arah Kebijakan Transformasi yang **mendukung 7 Strategi Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sulawesi Selatan**"*

17 ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI SULAWESI SELATAN

1. Kesehatan Untuk Semua
2. Pendidikan Kualitas yang Merata
3. Perlindungan Sosial yang Adaptif
4. Iptek, Inovasi, dan Produktifitas Ekonomi
5. Penerapan Ekonomi Hijau
6. Transformasi Digital
7. Integrasi Ekonomi Domestic dan Global
8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
9. Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovati
10. Ketaatan Hukum, Ketertiban dan keamaanan Tangguh, dan Demokrasi Berkeadilan
11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
12. Kerjasama Antar Daerah dan Daya Saing Daerah Tinggi
13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
15. Berketahanan Energi, Air dan Pangan
16. Lingkungan Hidup Berkualitas
17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Sumber: Perda No.7 Tahun 2024 (RPJPD 2025-2045 Sulsel)

: Arah pembangunan yang mendukung ekonomi hijau

Integrasi Ekonomi Hijau dalam RPJPD Sulawesi Selatan 2025-2045

Sistematika RPJPD	Muatan
BAB I (Pendahuluan/Latar Belakang)	RPJPD 2025-2045 Provinsi Sulawesi Selatan ini berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dalam perspektif **ekonomi hijau** dan ekonomi biru
BAB II **1.Penjelasan capaian Indeks Ekonomi Hijau di Sulawesi Selatan)** **2.Penyajian Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025, khususnya pada rekomendasi hasil evaluasi**	**Indeks Ekonomi Hijau** mengukur perkembangan keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi dan kesetaraan sosial masyarakat serta mitigasi risiko kerusakan lingkungan, dan sekaligus menjadi alat ukur untuk mengevaluasi capaian dan efektivitas transformasi ekonomi Indonesia menuju Ekonomi Hijau **Rekomendasi hasil evaluasi memuat hal berikut :** 1.Penentuan misi pembangunan jangka panjang perlu mememperhatikan kebutuhanpada tingkat lokal dan nasional serta merespon tehadap berbagai konteks global dengan **memprioritaskan** terhadap aspek keberlanjutan, perubahan iklim dan pertumbuhan **ekonomi hijau.** **2.Menguatkan kapasitas angkatan kerja** agar terserap ke dalam lapangan kerja sektor **ekonomi hijau**

Sumber: Perda No.7 Tahun 2024 (RPJPD 2025-2045 Sulsel)

Integrasi Ekonomi Hijau dalam RPJPD Sulawesi Selatan 2025-2045 (2)

"**Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Sulawesi Selatan** berada pada **level baik** atau capaian efektifitas transformasi ekonomi Sulawesi Selatan menuju ekonomi hijau semakin membaik dari tahun 2016 ke tahun 2021"

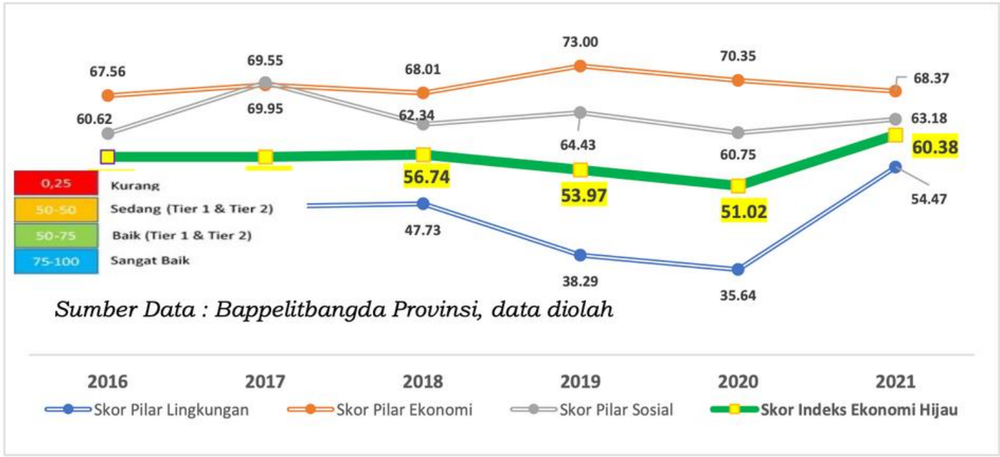

Sistematika RPJPD	Muatan
BAB III (Permasalahan & Isu Strategis) **Belum Optimalnya Penerapan Ekonomi Hijau**	• Progresnya lebih rendah dibanding Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara • **Pilar lingkungan memiliki skor komposit terendah** terutama pada indikator kualitas air • Indikator capaian kualitas air memiliki capaian yang masih rendah diantara pilar yang lainnya. • Masih tingginya alih fungsi lahan dan hutan • Alokasi tata ruang untuk budidaya belum sepenuhnya diseimbangkan dengan pelestarian kawasan lindung dan lahan kritis • Kapasitas pendanaan yalternatif berbasis lingkungan masih rendah

Sumber: Perda No.7 Tahun 2024 (RPJPD 2025-2045 Sulsel)

Integrasi Ekonomi Hijau dalam RPJPD Sulawesi Selatan 2025-2045 (3)

VISI RPJPD SULAWESI SELATAN 2025-2045

"SULAWESI SELATAN MAJU, MANDIRI & BERKELANJUTAN"

Sistematika RPJPD	Muatan
BAB IV (VISI DAN MISI pada penjelasan visi Berkelanjutan)	**Berkelanjutan** adalah kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2045 yang memiliki **kualitas lingkungan hidup** yang terpelihara serta ketersediaan sumberdaya alam yang menjamin keterpenuhan kebutuhan hidup generasi berikutnya. Hal ini dilandasi oleh semakin menguatnya komitmen dan implementasi dalam penerapan **ekonomi hijau** dan ekonomi biru, **resiliensi terhadap bencana dan dampak perubahan iklim**. Bentang lahan (landscape) Sulawesi Selatan terkelola melalui **pertanian berkelanjutan, pengembanga nenergi terbarukan, pariwisata ramah lingkungan, infrastruktur transportasi hijau, pengelolaan limbah terpadu, pendidikan lingkungan, dan inovasi teknologi hijau...**

Sumber: Perda No.7 Tahun 2024 (RPJPD 2025-2045 Sulsel)

Integrasi Ekonomi Hijau dalam RPJPD Sulawesi Selatan 2025-2045 (4)

Sistematika RPJPD	Muatan
BAB IV (VISI DAN MISI pada penjelasan misi ke 2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi)	**Ekonomi hijau** dan ekonomi biru sebagai bagian penting **transformasi ekonomi Sulawesi Selatan** akan mendorong ekosistem yang sehat dan produktif; pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, adil, dan merata; penghidupan yang adaptif terhadadinamika ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Misi, Sasaran Pokok, Arah Pembangunan & Indikator RPJPD SULSEL 2025-2045 (Terkait Penerapan Ekonomi Hijau)

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan	*Baseline* 2025	Tahap 1 2029	Tahap 2 2034	Tahap 3 2039	Tahap 4 2045
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi	3. Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan pendukung IKN berbasis ekonomi hijau dan transformasi digital	SS05. Penerapan Ekonomi Hijau	18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau					
				a) Indeks Ekonomi Hijau	67,8	69,65	71,95	74,26	77,03
				b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	35,80	59,02	65,48	71,94	76,69
		SS06. Transformasi Digital	19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	6,34	6,77	7,19	7,7
	4. Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai Hub Perdagangan Kawasan Timur Indonesia dan Internasional	SS07. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20	Koefisien variasi harga antar wilayah Tingkat provinsi	8,67	7,99	7,13	6,28	5,25
			21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	38,07	38,28	38,49	38,7	38,92
			22	Ekspor Barang & Jasa (% PDRB)	6,8	8,3	9,8	11,3	12,9

Sumber: Perda No.7 Tahun 2024 (RPJPD 2025-2045 Sulsel)

Integrasi Ekonomi Hijau dalam RPJPD Sulawesi Selatan 2025-2045 (5)

Sistematika RPJPD	Muatan
BAB V (ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK) **1. Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi berdasarkan 4 tahapan transformasi)** **2. Rumusan sasaran pokok, arah pembangunan, dan arah kebijakantransformasi**	**Tahap 1. Konsolidasi Penguatan Fondasi Transformasi.** “pertumbuhan ekonomi yang kuat melalui hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan penguatan ekosistem industrialisasi, serta penguatan pengembangan sektor unggulan dan kerjasama daerah dalam skala regional, nasional dan global.” **Tahap 2. Akselerasi Transformasi** “peningkatan produktivitas daerah, penguatan dan perluasan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, penguatan struktur industri, serta optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru seperti penerapan ekonomi biru, ekonomi hijau dan bioekonomi beserta penguasaan teknologi menengah dan tinggi.” **Tahap 3. Perluasan Transformasi** “peningkatandaya saing ekonomi dan berkelanjutan dengan menekankan pada perluasan dan penguatan rantai nilai, penguasaan teknologi tinggi, penguatan daya saing industri, dan memantapkan posisi Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang dan barometer Kawasan Timur Indonesia. “ **Tahap 4. Perwujudan Transformasi.** ”diarahkan pada perwujudan Sulawesi Selatan sebagai provinsi berpendapatantinggi dan menempati posisi lima besar sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara Nasional, ditopang oleh sektor ekonomi hijau dan biru unggulan yang tangguh iklim.” •**Termuat pada sasaran pokok ke 3,** yaitu Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan pendukung IKN berbasis ekonomi hijau dan transformasi digital •**Termuat pada Arah Pembangunan ke 5** yaitu Penerapan Ekonomi Hijau •**Termuat pada rumusan Arah Kebijakan Transformasi**, khususnya pada Arah Pembangunan Penerapan Ekonomi Hijau

Sumber: Perda No.7 Tahun 2024 (RPJPD 2025-2045 Sulsel)

Kebijakan Pendukung Indikator Ekonomi Hijau

MENTERI DALAM NEGERI
DAN
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 10 Januari 2024
Kepada Yth,
Sdr. 1. Gubernur
2. Ketua DPRD Provinsi
di-
seluruh Indonesia

SURAT EDARAN BERSAMA
NOMOR: 600.1/176/SJ
NOMOR: 1 Tahun 2024

TENTANG

PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2025-2045

Dalam SEB Menteri PPN/Bappenas dan Mendagri tentang Pedoman Penyelarasan Muatan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045, khususnya pada **Buku 1 SEB bagian Penjelasan Meta Data tentang Indeks Ekonomi Hijau**

*"**Ekonomi Hijau** adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. **Indeks Ekonomi Hijau** ditujukan sebagai alat untuk mengukur progres dan capaian transformasi ekonomi menuju Ekonomi Hijau secara tangible, representatif, dan akurat."*

Indikator

1. Tutupan hutan,
2. Energi baru terbarukan,
3. Kualitas air permukaan,
4. Kualitas udara,
5. Penurunan emisi, dan
6. Lahan gambut terdegradasi.
7. Intensitas emisi,
8. Intensitas energi,
9. GNI per kapita,
10. Produktivitas pertanian,
11. Produktivitas tenaga kerja industri
12. Produktivitas tenaga kerja jasa.
13. Rata-rata lama sekolah,
14. Angka harapan hidup,
15. Tingkat kemiskinan,
16. Tingkat pengangguran.

Sumber Data Indikator Ekonomi Hijau

Indikator	Sumber Data
1.Tutupan hutan,	1.Persentase luas tutupan hutan dari luas daratan (%): KLHK
2.Energi baru terbarukan,	2.Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) dari pasokan energi primer (%): Kementerian ESDM
3.Kualitas air permukaan,	3.Kualitas air permukaan - konsentrasi BOD (mg/L): Statistik Lingkungan Hidup, BPS
4.Kualitas udara,	4.Kualitas udara - konsentrasi NO2 (µg/m3): Laporan Kualitas Udara, KLHK
5.Penurunan emisi, dan	5.Persentase penurunan emisi kumulatif dari baseline (%): Laporan Perhitungan AKSARA, Bappenas
6.Lahan gambut terdegradasi.	6.Penurunan tutupan lahan gambut (%): Balai Besar Sumberdaya Lahan dan Pertanian (Diolah)
7.Intensitas emisi,	7.Intensitas Emisi: Laporan Perhitungan AKSARA, Bappenas
8.Intensitas energi,	8.Intensitas Energi Final (BOE/2010 IDR miliar): ESDM (Diolah)
9.GNI per kapita,	9.Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan 2010 (2010 IDR miliar): BPS
10.Produktivitas pertanian,	10.Produktivitas pertanian (ton/hektar/tahun): Kementerian Pertanian, KKP, dan BPS
11.Produktivitas tenaga kerja industri	11.Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur (IDR juta/orang): BPS
12.Produktivitas tenaga kerja jasa.	12.Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Jasa (IDR juta/orang): BPS
13.Rata-rata lama sekolah,	13.Rata-rata Lama Sekolah (tahun): BPS
14.Angka harapan hidup,	14.Angka Harapan Hidup (tahun): BPS
15.Tingkat kemiskinan,	15.Tingkat Kemiskinan (%): BPS
16.Tingkat pengangguran.	16.Tingkat Pengangguran Terbuka (%): BPS

Perhitungan Indeks Ekonomi Hijau

1 Perhitungan skor capaian/tahun untuk tiap indikator

9 Indikator dengan progres yang diinginkan meningkat:

1. Luas hutan
2. Bauran EBT
3. Penurunan emisi
4. PDRB/kapita
5. Produktivitas pertanian
6. Produktivitas tenaga kerja industri
7. Produktivitas tenaga kerja jasa
8. Rata-rata lama sekolah
9. Angka harapan hidup

$$Skor\,(y^i) = \frac{(y^i - y^{min})}{(y^{max} - y^{min})}\ x\ 100$$

7 Indikator dengan progres yang diinginkan menurun:

1. Konsentrasi BOD (Kualitas air permukaan)
2. Konsentrasi NO_2 (Kualitas udara)
3. Intensitas emisi
4. Persentase lahan gambut terdegradasi
5. Intensitas energi final
6. Tingkat kemiskinan
7. Tingkat pengangguran terbuka

Keterangan:
y^i = nilai indikator di tahun berjalan
y^{min} = nilai batas minimum indikator (referensi/theoretical min)
y^{max} = nilai target yang ingin dicapai

2 Perhitungan skor capaian/tahun untuk tiap pilar

Skor Pilar Lingkungan

$$Skor\ lingkungan = \frac{\sum_{j=1}^{i} Skor^{i,j}}{5\ atau\ 6}$$

tanpa atau dengan indikator gambut

Skor Pilar Ekonomi

$$Skor\ ekonomi = \frac{\sum_{j=7}^{i} Skor^{i,j}}{6}$$

Skor Pilar Sosial

$$Skor\ sosial = \frac{\sum_{j=13}^{i} Skor^{i,j}}{4}$$

3 Perhitungan skor capaian/tahun Indeks Ekonomi Hijau Provinsi

Indeks Ekonomi Hijau: (Skor Lingkungan x 0,5) + (Skor Ekonomi x 0,3) + (Skor Sosial x 0,2)

**Pembobotan lingkungan:ekonomi:sosial = 50:30:20*

Klasifikasi Skor Indeks Ekonomi Hijau:

0,00 - 25,00	: Kurang
25,01 - 37,50	: Sedang Tier 1
37,51 - 50,00	: Sedang Tier 2
50,01 - 62,50	: Baik Tier 1
65,51 - 75,00	: Baik Tier 2
75,01 - 100,00	: Sangat Baik

Arah Pembangunan Kawasan Terkait Ekonomi Hijau

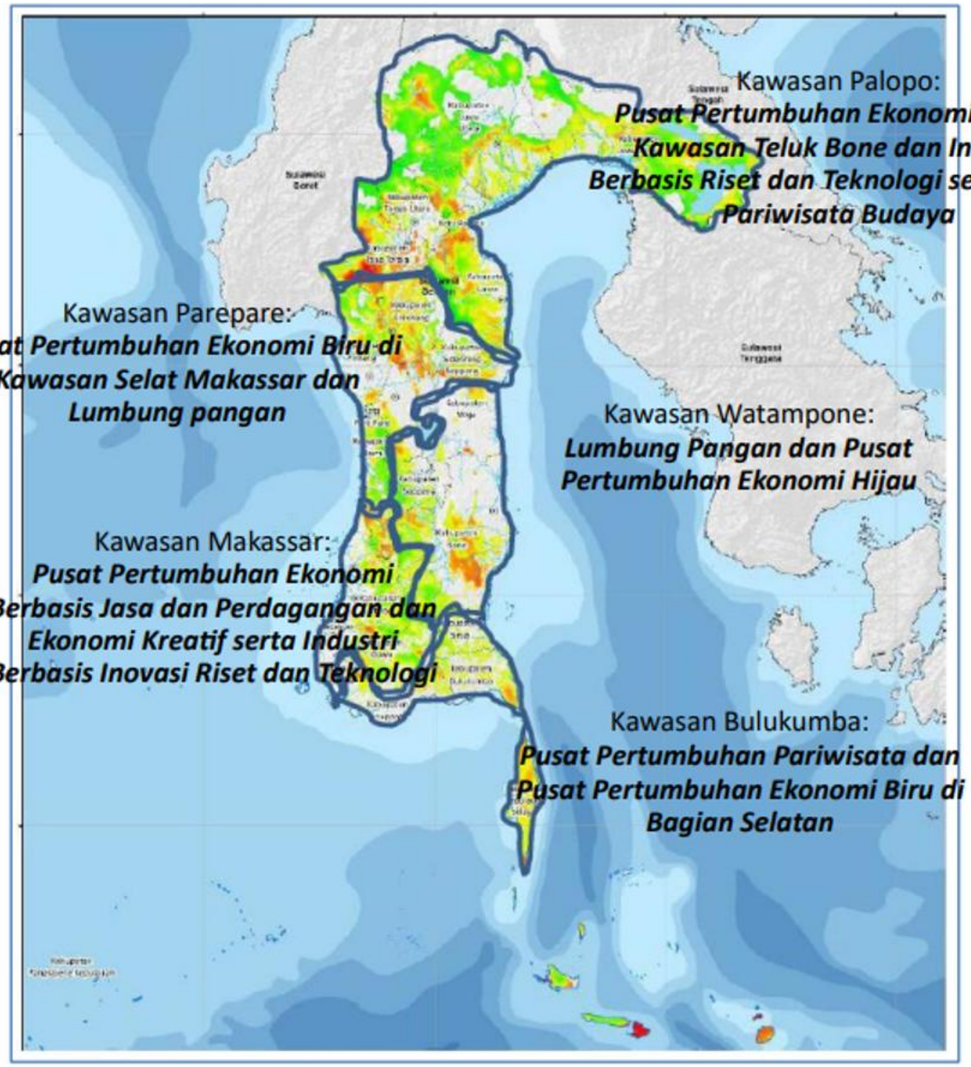

Kawasan Pembangunan Watampone diarahkan menjadi Lumbung Pangan dan Pusat Pertumbuhan **Ekonomi Hijau**. Peran Kawasan Watampone sebagai lumbung pangan tidak hanya sebagai lumbung pangan regional namun juga diarahkan untuk mendukung kebutuhan pangan IKN.

Kawasan Pembangunan Palopo. Pengembangan pusat pertumbuhan baru berbasis ekonomi biru dan **ekonomi hijau** yang didukung oleh digitalisasi ekonomi dan optimalisasi kawasan industri prioritas nasional berbasis komoditas unggulan. pengembangan kawasan sentra pertanian dan perkebunan khususnya komoditas sagu sebagai bahan pangan alternatif yang didukung oleh sentra industri pengolahan; peningkatan produktivitas komoditas perkebunan unggulan wilayah, dan terkhusus untuk kelapa sawit dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan lahan berkelanjutan berbasis ketaatan rencana tata ruang wilayah

Kawasan Parepare diarahkan menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru di Kawasan Selat Makassar dan Lumbung Pangan Berbasis Pertumbuhan Ekonomi Hijau Mendukung IKN. Pengembangan **ekonomi hijau** terutama pengembangan kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan

Sumber: Perda No.3 Tahun 2022 RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, diolah tahun 2025
(Termuat dalam RPJPD 2025-2045 Sulsel)

Integrasi Ekonomi Hijau dalam Rancangan Awal RPJMD Sulsel 2025-2029

VISI RPJMD

"Sulawesi Selatan MAJU dan BERKARAKTER"

Sulawesi Selatan yang Maju juga dicirikan oleh meningkatnya komitmen penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru, terjaganya kualitas lingkungan hidup, serta menguatnya ketahanan energi, air, dan pangan

Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
3. Mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pembangunan pedesaan, hilirisasi sumber daya alam, pengembangan pariwisata dan peningkatan investasi daerah secara berkelanjutan untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	**3. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian Sulawesi Selatan yang berkelanjutan dan berdaya saing**		**IT. 3** **1. Pertumbuhan Ekonomi** **2. PDRB Perkapita** **3. Indeks Daya Saing Daerah**
		6. Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis Iptek , inovasi, dan ekonomi hijau dan biru	IS. 6 1. Indeks Inovasi Daerah 2. Indeks Ekonomi Hijau 3. Indeks Ekonomi Biru

Indikator Kinerja Utama & Proyeksi Target Capaian Indeks Ekonomi Hijau 2025-2030:

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Daerah								
IS. 6	1. Indeks Kapabilitas Inovasi	Angka	n.a	3,8	3,82-3,85	3,85-3,9	3,87-3,95	3,9 – 4,0	3,93 – 4,05
	2. Indeks Ekonomi Hijau	Persen	n.a	67,8	68,26	68,72	69,18	69,65	70,11
	3. Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Skor	n.a	71,31	84,06	96,8	109,56	122,3	135,05

Sumber: Rancangan RPJMD Sulsel 2025-2029

Strategi Peningkatkan Produktivitas Ekonomi berbasis Iptek, Inovasi, dan Ekonomi hijau

Arah Kebijakan

1. Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, dan kehutanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya
2. Penumbuhan dan peningkatan kapasitas *emerging sectors* (bioekonomi dan bioteknologi, pendidikan dan riset, serta manajemen sumber daya)
3. Penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan
4. Peningkatan nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (*eco-tourism*)
5. Penguatan sektor pertanian, perikanan dan kelautan, peningkatan produktivitas sektor perkebunan, serta pengembangan industri pengolahan sebagai penunjang ekonomi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)
6. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, diantaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah
7. Penguatan regulasi, kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah, serta infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah
8. Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah
9. Pengelolaan lahan, kawasan laut, dan pesisir secara berkelanjutan
10. Peningkatan rehabilitasi lahan, pesisir dan laut

Sumber: Rancangan RPJMD Sulsel 2025-2029

Rekomendasi Program Prioritas

1. Penerapan budidaya pertanian dan perairan berbasis konservasi lahan/laut, rendah karbon, dan cerdas iklim
2. Pengembangan Agroforestri
3. Rehabilitasi lahan, pesisir, dan laut
4. Pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan
5. Pengembangan green jobs
6. Perluasan akses dan literasi keuangan inklusif dan produktif bagi petani dan nelayan

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Sulsel 2025-2029

Terima Kasih

BAPPELITBANGDA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

bappelitbangda@sulselprov.go.id
bappelitbangda22@gmail.com

0411-453486

Urip Sumoharjo No. 269 Km. 5
Makassar, Sulawesi Selatan, 90231